





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BADUNG MENURUT PENGELUARAN 2010 - 2016

ISSN: 2087-6866

No. Publikasi : 5103.17.03 Katalog : 9302003.5103

Ukuran Buku : 14,8 cm X 21 cm Jumlah Halaman : xiv + 106 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Badung

Gambar Kover:

BPS Kabupaten Badung

Ilustrasi Kover:

Pusat Perbelanjaan Beachwalk Kuta-Bali

Diterbitkan oleh:

©BPS Kabupaten Badung

Dicetak oleh:

CV. Bhineka Karya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan tujuan komersil tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran 2010-2016

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Dewa Made Suambara, MMA

Editor:

Ir. Dewa Made Suambara, MMA

Penulis:

I Wayan Putrawan, SST., M.Si

Disain:

l Gusti Bagus Adi Sudiarsana, S.Si





Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya publikasi "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung Menurut Tahun 2010-2016" Pengeluaran terwujud tepat pada waktunya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/ akhir. Data **PDRB** dalam permintaan publikasi ini mengunakan tahun dasar 2010,

serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Komponen yang tercakup dalam PDRB menurut pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor, serta Ekspor Neto Antar Daerah. Besaran setiap komponen tersebut ditampilkan dalam analisis deskriptif, yang diharapkan dapat menggugah minat para pengguna data baik penentu kebijakan maupun kalangan akademisi.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang.

Mangupura, 22 September 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Kepala,

Ir. Dewa Made Suambara, MMA

hiile: Illoadungkalo iops ioo io

DAFTAR ISI

HALAM	AN JU[DUL	i
KATA PE	NGAN	ITAR	٧
DAFTAR	ISI		vii
DAFTAR	TABE	L	ix
DAFTAR	GRAF	IK	хi
DAFTAR	LAMP	PIRAN	xiii
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	1.1	Pengertian Pendapatan Regional	3
	1.2	Perubahan Tahun Dasar PDRB	8
BAB II	MET	ODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	17
	2.1	Pengeluaran Konsumsi Akhir RumahTangga	19
	2.2	Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	22
	2.3	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	25
	2.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).	29
	2.5	Perubahan Inventori	33
	2.6	Ekspor Impor	37
BAB III	TINJ	AUAN EKONOMI KABUPATEN BADUNG	41
	3.1	Tinjauan Agegat PDRB Kabupaten Badung	
		Menurut Pengeluaran	44
	3.2	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah	
		Tangga	52
	3.3	Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	55
	3.4	Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	57
	3.5	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap	
		Bruto	62
	3.6	Perkembangan Perubahan Inventori	67
	3.7	Perkembangan Ekspor Barang Dan Jasa	
		Luar Negeri	69
	3.8	Perkembangan Impor Barang Dan Jasa	
		Luar Negeri	72

PERK	KEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN	
BAD	UNG MENURUT PENGELUARAN	75
4.1	PDRB (Nominal)	77
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk	
	Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap	
	Ekspor	80
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah	
	Tangga Terhadap PMTB	82
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	83
4.5	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	85
4.6	Perbandingan PDRB Terhadap Impor	87
4.7	Neraca Perdagangan (Trade Balance)	88
4.8	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	90
PENI	JTUP	93
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran	97
AN		99
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 PENU 5.1 5.2	 4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016 (Miliar Rp)	44
TABEL 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016 (Miliar Rp)	45
TABEL 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016 (Persen)	47
TABEL 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2011-2016 (Persen)	49
TABEL 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010 =100) Kabupaten Badung, 2011-2016	51
TABEL 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2010-2016	52
TABEL 7.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Badung, 2011—2015 (Miliar Rupiah)	56
TABEL 8.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Badung, 2010 – 2016	58
TABEL 9.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Badung, 2010-2016	64
TABEL 10.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Badung, 2010-2016	67
TABEL 11.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2010-2016	70
TABEL 12.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2010-2016	73

TABEL 13.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Badung, 2010-2016	78
TABEL 14.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 2010-2016	81
TABEL 15.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB 2010-2016	83
TABEL 16.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Badung, 2010-2016.	84
TABEL 17.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) 2010-2016	86
TABEL 18.	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Badung 2010-2016	87
TABEL 19.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Badung 2010-2016	89
TABEL 20.	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Badung, 2010-2016	91

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh	
	Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten	
	Badung, 2010 – 2016 (Milyar)	46

hite: Ilbadunokab ida

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016 (Juta Rupiah)	101
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016 (Juta Rupiah)	102
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016 (persen)	103
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran , Kabupaten Badung 2010-2016 (Persen)	104
Lampiran 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran , Kabupaten Badung 2011-2016	105
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran , Kabupaten Badung 2011-2016	106

hite: Ilbadunokab ibes ibo

BAB I ADAF. PENDAHULUAN

niie iloadungkab ings igo igo

1.1 Pengertian Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (frame work) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu hasil "akhir" dari proses produksi menggambarkan berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi

menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas iasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRR Pengeluaran menggambarkan aktivitas dilakukan para pengeluaran pelaku ekonomi yang mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda tersebut dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

٠

² Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

domestik. digunakan sebagai konsumsi "akhir" vang oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke

waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (statistical descrepancy) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang

^{3. -} Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

⁻ Disebut sebagai pendekatan "riil"

Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

berbeda disebut sebagai "output akhir (final output)". Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta Inventori + X - M$$

Keterangan:

Y (Income) = PDRB Produksi

C (Consumption) = Konsumsi akhir

GFCF (Gross Fixed Pembentukan Modal

Capital Formation) Tetap Bruto

Δ Inventori = Perubahan Inventori

X = Ekspor M = Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (external transaction). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk Supply and Use Tables (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut estimasi PDB dan komponen-komponennya. diperoleh nilai Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai (benchmark) ketika BPS Provinsi **BPS** acuan maupun Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (account) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;

Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama
 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi,
 teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada
 pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

 Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

Konsep dan Cakupan

- a. Sumber daya hayati (cultivated biological resources/CBR). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (military weapon systems/MWS). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, vang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (research and development/RnD). RnD merupakan nilai pengeluaran

- untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (mineral exploration and evaluation/MEE). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (computer software and databases/CSD). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (entertainment, literary or artistic originals/ELA). ELA merupakan nilai pembelian

atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (Financial intermediation services indirectly measured/FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (deposits), bunga pinjaman (loans), dan suku bunga referensi (reference). Metoda ini menggantikan metoda Imputed Bank Services Charge (IBSC).

Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

	PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4.	Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5.	Ekspor	6. Ekspor
6.	Impor	7. Impor

hiile: Illoadungkalo ibos igo id

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

hiilo: Illoadungkalo illos igo ild

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, <mark>umumnya</mark> nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

- 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- 3. Pakaian dan alat kaki
- 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
- 6. Kesehatan
- 7. Angkutan
- 8. Komunikasi
- 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- 10. Pendidikan
- 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- 12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

- 1. Makanan, Minuman, dan Rokok
- 2. Pakaian dan Alas Kaki
- Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 4. Kesehatan dan Pendidikan
- 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 6. Hotel dan Restoran
- 7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda),
 BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

- Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
- Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
- 3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
- 4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
- Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);

- Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
- Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh:
 PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani
 Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

- Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP:
- Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
- Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
- 4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);

- Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- 6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

- Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
- 2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan

memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia

- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output + Penjualan barang dan jasa + Social transfer in kind purchased market production + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

- Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
- 2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses

produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products);
- Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar
 BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS

- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber
 Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal
Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal
Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara mendeflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga Konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori

i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut meniadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan

politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan;
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
- 3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- 5. Data komoditas perkebunan;
- 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- 8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung

jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku =

(Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan =

PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan =

Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -

Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku =

PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. Ekspor Impor

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metoda tidak langsung.

hii Pilloadungkabingsigo

BAB III

TINJAUAN PEREKENOMIAN KABUPATEN BADUNG



hite: III adungkab ibasida iba

Perkembangan perekonomian dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan baik pada perekonomian global, nasional maupun regional yang berpengaruh pada perekonomian lokal khususnya Kabupaten Badung. Di tengah perekonomian terbuka seperti sekarang ini, perekonomian Kabupaten Badung selain dipengaruhi oleh faktor di dalam Kabupaten Badung sendiri, juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian antar kabupaten di Bali, perekonomian nasional bahkan dunia. Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang sangat menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata, tentu sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia.

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN, meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tak terkecuali Badung. Selain faktor eksternal tersebut, pembangunan yang terjadi di dalam Kabupaten Badung sendiri juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam perilaku masing-masing nilai pengeluaran akhir.

Data yang ada menunjukan bahwa setiap pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Badung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan

perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Tinjauan Agegat PDRB Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Kabupaten Badung menunjukkan indikasinya yang makin baik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

TABEL 1.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016

(Miliar Rp.)

(iviliai Kp)								
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Konsumsi Rumah Tangga	10.063,38	11.403,67	12.628,17	13.582,46	15.197,89	17.274,59	19.099,34	
2. Konsumsi LNPRT	91,92	104,87	121,62	169,04	193,86	223,00	244,28	
3. Konsumsi Pemerintah	1.793,06	2.115,13	2.456,84	2.806,67	2.698,62	2.956,43	3.003,77	
4. PMTB	8.232,32	10.051,86	12.274,65	12.999,41	13.890,43	15.939,70	18.484,48	
5. Perubahan Inventori	263,71	386,93	548,69	516,79	415,87	108,66	135,29	
6. Ekspor	14.721,11	17.023,57	21.535,02	25.558,78	30.885,87	31.499,93	35.829,23	
7. Impor	14.316,94	17.577,56	22.364,24	23.843,10	26.009,27	26.618,02	30.648,51	
Total PDRB	20.848,56	23.508,47	27.200,75	31.790,03	37.273,28	41.384,28	46.147,88	

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Badung (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2010-2016 menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada Tahun 2010 PDRB (ADHB) Kabupaten Badung sebesar Rp. 20.848,56 milyar dan meningkat terus menjadi Rp. 46.147,88 milyar pada Tahun 2016. Jika dirata-ratakan selama tujuh tahun terakhir PDRB (ADHB) naik sekitar Rp. 4.216,55 milyar setiap tahun.

TABEL 2.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.063,38	10.803,83	11.433,42	11.669,45	12.317,66	13.220,87	14.207,92
2. Konsumsi LNPRT	91,92	99,57	108,46	137,58	139,57	146,35	156,03
3. Konsumsi Pemerintah	1.793,06	1.927,96	2.062,37	2.202,76	1.994,11	2.049,10	2.018,26
4. PMTB	8.232,32	9.539,52	10.565,50	11.073,70	11.120,65	11.892,74	12.950,37
5. Perubahan Inventori	263,71	260,58	378,31	233,76	205,07	51,07	62,37
6. Ekspor	14.721,11	15.331,97	19.848,59	23.591,06	26.748,14	27.167,34	28.369,64
7. Impor	14.316,94	15.640,74	20.368,99	23.241,78	25.067,14	25.346,99	26.604,01
Total PDRB	20.848,56	22.322,70	24.027,65	25.666,53	27.458,06	29.180,48	31.160,58

Keterangan:

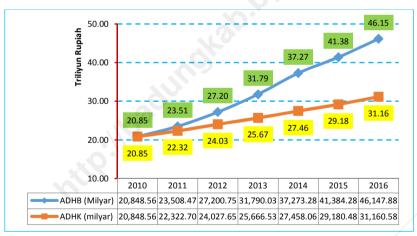
^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, akan dapat dilihat gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitasnya saja tanpa ada pengaruh harga. PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

GRAFIK 1.

Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010 – 2016 (Milyar)



Selama kurun waktu 2010–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Badung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran

akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Grafik 1. di atas, terlihat bahwa, pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku, selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannnya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

TABEL 3.
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2010-2016
(Persen)

			- ,				
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	48.27	48.51	46,43	42,73	40,77	41,74	41,39
2. Konsumsi LNPRT	0.44	0.45	0,45	0,53	0,52	0,54	0,53
3. Konsumsi Pemerintah	8.60	9.00	9,03	8,83	7,24	7,14	6,51
4. PMTB	39.49	42.76	45,13	40,89	37,27	38,52	40,05
5. Perubahan Inventori	1.26	1.65	2,02	1,63	1,12	0,26	0,29
6. Ekspor	70.61	72.41	79,17	80,40	82,86	76,12	77,64
7. Impor	68.67	74.77	82,22	75,00	69,78	64,32	66,41
Total PDRB	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Secara umum, komposisi penggunaan produk yang dihasilkan di Kabupaten Badung sedikit berbeda dengan kabupaten/kota yang ada di Bali. Sebagian besar produk yang dihasilkan, digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan khususnya Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Badung memberikan kontribusi yang cukup besar dari keseluruhan pengeluaran jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Bali. Bahkan pada tahun 2012 peranan pengeluaran PMTB mencapai 45,13 persen. Sementara itu, pengeluaran terhadap konsumsi rumah tangga secara rata-rata selama tujuh tahun menyumbang sebesar 44,26 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku.

Selain pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Badung juga didorong oleh ekspor impor. Sebagai destinasi pariwisata terbesar di Bali, Kabupaten Badung mampu melakukan ekspor terutama ekspor jasa kepada para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik luar Badung. Namun sebaliknya, besaran impor Kabupaten Badung tidak bisa dikatakan sedikit. Bahkan pada tahun 2011 dan 2012 besaran impor Kabupaten Badung lebih besar dibandingkan ekspor, sehingga secara net terjadi posisi "defisit" dalam transaksi ekspor-impor Kabupaten Badung. Selanjutnya tahun 2013-2016 kondisi ekspor impor Kabupaten Badung mengalami surplus (ekspor lebih besar dibandingkan impor).

Pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar dalam pembentukan PDRB pengeluaran Badung. Pengeluaran ini menyumbang secara rata-rata sebesar 8,05 persen selama tujuh tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peran konsumsi pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Komponen lainnya PDRB pengeluaran Badung yaitu konsumsi LNPRT secara rata-rata dalam tujuh tahun terakhir mencatat kontribusi hanya sebesar 0,49 persen, dan perubahan inventori hanya menyumbang peran rata-rata pertahun sebesar 1,18 persen selama periode 2010-2016.

TABEL 4.
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2011-2016
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.36	5,83	2,06	5,55	7,33	7,47
2. Konsumsi LNPRT	8.32	8,93	26,85	1,45	4,86	6,62
3. Konsumsi Pemerintah	7.52	6,97	6,81	-9,47	2,76	-1,51
4. PMTB	15.88	10,76	4,81	0,42	6,94	8,89
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Ekspor	4.15	29,46	18,86	13,38	1,57	4,43
7. Impor	9.25	30,23	14,10	7,85	1,12	4,96
Total PDRB	7,07	7,64	6,82	6,98	6,27	6,79

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selain besaran distribusi dan besaran nominal, agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic Pertumbuhan ekonomi growth). menggambarkan kineria pembangunan di bidang ekonomi di wilayah tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan 2016 secara rata-rata mencapai 6,93 persen, dengan masing-masing pertumbuhan 7.07 persen (2011): 7,64 persen (2012); 6,82 persen (2013); 6,98 persen (2014); 6,27 persen (2015); dan melambat menjadi 6,79 persen pada 2016. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 7,64 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (6,27 persen). Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Oleh sebab itu Kabupaten Badung termasuk salah satu pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali.

Perekonomian Kabupaten Badung dalam 5 tahun terakhir selalu tumbuh namun terlihat fluktuatif. Percepatan pertumbuhan terjadi pada tahun 2012 dari tahun 2011, tahun 2014 dari pertumbuhan 2013, dan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Hal ini kemungkinan terjadi karena besarnya PMTB yang terjadi di Kabupaten Badung pada tahun tersebut yang merupakan puncak pembangunan mega proyek di Kabupaten Badung, diantaranya

adalah pembangunan Jalan Tol Di Atas Perairan, pembangunan underpass Simpang Dewa Ruci, dan juga perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai. Penyelesaian pembangunan ini terjadi pada tahun 2013.

implisit⁶ **PDRB** Indeks vang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnva (perusahaan dan luar negeri) juga menuniukkan peningkatan selama rentang waktu dari tahun 2011 sampai 2016. Indeks implisit pada tahun 2011 sebesar 105,31 lalu meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi sebesar 148,10 tahun 2016.

TABEL 5.
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010=100)
Kabupaten Badung, 2011-2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	105.55	110,45	116,39	123,38	130,66	134,43
2. Konsumsi LNPRT	105.33	112,13	122,86	138,90	152,37	156,56
3. Konsumsi Pemerintah	109.71	119,13	127,42	135,33	144,28	148,83
4. PMTB	105.37	116,18	117,39	124,91	134,03	142,73
5. Perubahan Inventori	148.49	145,04	221,08	202,79	212,78	216,90
6. Ekspor	111.03	108,50	108,34	115,47	115,95	126,29
7. Impor	112.38	109,80	102,59	103,76	105,01	115,20
Total PDRB	105.31	113,21	123,86	135,75	141,82	148,10

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

⁶ Indeks perkembangan

3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga adalah salah satu mesin utama bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi yang hampir berimbang dengan PMTB dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan konsumsi akhir rumah tangga yang hampir sebesar setengah dari total PDRB setiap tahunnya, dengan nilai konsumsi akhir rumah tangga memberikan kontribusi sekitar 40 persen sampai hampir 50 persen terhadap total PDRB periode 2010-2016.

TABEL 6.

Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Badung, 2010-2016

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
То	tal Konsumsi Ru	ımah Tangg	ga					
a.	ADHB (Miliar Rp)	10.063,38	11.403,67	12,628.17	13,582.46	15,197.89	17,274.59	19,099.34
b.	ADHK 2010 (Miliar Rp)	10.063,38	10.803,83	11,433.42	11,669.45	12,317.66	13,220.87	14,207.92
	oporsi terhadap PRB (% ADHB)	48,27	48,51	46.43	42.73	40.77	41.74	41.39
Ra	ta-rata konsums	i per-kapita	a/tahun <i>(Ri</i>	bu Rp)				
а	. ADHB	18.407,51	20.331,02	21,962.04	23,060.21	25,216.35	28,024.96	30,316.42
b	. ADHK 2010	18.407,51	19.261,60	19,884.21	19,812.30	20,437.46	21,448.53	22,552.25
Pe	rtumbuhan ⁷							
а	. Total konsumsi RT		7,36	5.83	2.06	5.55	7.33	7.47
b	. Perkapita	'	4,64	3.23	-0.36	3.16	4.95	5.15
	mlah penduduk 00 org)	546,70	560,90	575.0	589.0	602.7	616.4	630.0

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Nominal konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun riil atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2010-2016 seperti terlihat pada Tabel 6. Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk yang cukup besar, nilai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan penyumbang yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Badung. Hal ini tidak terlepas dari Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan migran dimana peluang ekonomi dipandang masih cukup besar sehingga jumlah penduduk tiap tahun meningkat.

Perkembangan peranan konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung berfluktuasi pada periode tahun 2010-2016. Peranan konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2010 sebesar 48,27 persen, meningkat pada tahun 2011 menjadi 48,51 persen. Pada tahun 2012 peranan komponen ini sebesar 46,43 persen, lalu menurun pada tahun 2013 menjadi 42,73 persen. Kemudian pada tahun berikutnya kembali turun menjadi sebesar 40,77 persen pada tahun 2014, baru kemudian meningkat menjadi sebesar 41,74 persen pada tahun 2015, dan sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 41,39 persen. Hal ini lebih disebabkan karena proporsi komponen lainnya mengalami peningkatan terutama pada tahun 2011/2012. Pada tahun 2012 ini terjadi pembangunan infrastruktur yang meningkat cukup signifikan sehingga proporsi terhadap PMTB cukup tinggi, namun demikian proporsi terhadap konsumsi akhir rumah tangga masih cukup besar. Sementara itu

yang terjadi pada tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016, peranan konsumsi akhir rumah tangga relatif lebih rendah dari kondisi tahun 2012 disebabkan karena kinerja ekspor Kabupaten Badung yang cukup baik. Dilihat dari besarnya kontribusi net ekspor pada dua tahun terakhir ini.

Konsumsi rumah tangga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dengan rata-rata konsumsi perkapita yang cenderung meningkat. Selain karena jumlah penduduk, pendapatan penduduk yang meningkat yang tergambar secara tidak langsung melalui PDRB perkapita, menyebabkan pengeluaran atas konsumsi juga meningkat. Menurut teori ekonomi, semakin besar pendapatan seseorang, maka pengeluaran konsumsi juga semakin besar. Pola konsumsi yang semakin meningkat tentu sangat mudah terjadi, sedangkan jika pendapatan menurun, pola konsumsi tidak akan banyak berkurang.

Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukan fluktuasi yang cukup besar. Meskipun mengalami fluktuasi, namun pertumbuhan yang bernilai positif, tetap menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga perkapita secara "riil" pada tahun 2013 bernilai negatif sebesar 0,36 persen yang terjadi akibat rendahnya pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga pada tahun

tersebut yaitu hanya sebesar 2,06 persen sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen pada tahun yang sama. Sementara itu pada tahun-tahun berikutnya rata-rata pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga perkapita bernilai positif dan cenderung meningkat. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga perkapita, laju pertumbuhan total konsumsi akhir rumah tangga juga mengalami fluktuasi yang serupa. Pertumbuhan total konsumsi berkisar antara 2,60 persen sampai 7,47 persen periode waktu 2010-2016. Secara rata-rata pertumbuhan total konsumsi akhir rumah tangga pada periode tersebut sebesar 5,93 persen. Sementara itu rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung periode dalam periode yang sama hanya mencapai sekitar 2,4 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi akhir rumah tangga dari sisi kuantitas dan kualitas.

3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam pelaksanaannya kegiatan mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Bentuk Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga misalnya Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga

dan hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, serta Organisasi Bantuan Kemanusiaan/ Beasiswa. Peranan lembaga nonprofit di Indonesia, masih terbilang rendah, tidak seperti di luar negeri. Begitupula halnya dengan Kabupaten Badung, dimana peranan LNPRT paling rendah diantara semua komponen PDRB pengeluaran. Selama lima tahun berturut-turut peranan LNPRT ini tidak lebih dari satu persen dari total PDRB Kabupaten Badung.

TABEL 7.
Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Badung, 2010-2016
(Miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi LNPRT							
a. ADHB (Miliar Rp)	91,92	104,87	121,62	169,04	193,86	223,00	244,28
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	91,92	99,57	108,46	137,58	139,57	146,35	156,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,44	0,45	0,45	0,53	0,52	0,54	0,53
Pertumbuhan		8,32	8,93	26,85	1,45	4,86	6,62

Keterangan:

Total konsumsi LNPRT terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam periode tahun 2010-2016. Peningkatan konsumsi LNPRT tertinggi

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

terjadi pada tahun 2013, dimana nilai konsumsi LNPRT, mengalami peningkatan sebesar 47,42 miliar menurut harga berlaku, dan sebesar 29,13 miliar menurut harga konstan atau dikatakan mengalami pertumbuhan sebesar 26,85 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2013 merupakan tahun persiapan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu), baik legislatif maupun pemilihan Presiden yang dilaksanakan tahun 2014. Salah satu yang masuk dalam lembaga non profit ini adalah Partai Politik. Pada tahun 2013 Parpol banyak mengadakan kegiatan persiapan Pemilu.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, peranan konsumsi LNPRT di Kabupaten Badung adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Namun proporsi konsumsi LNPRT ini dibandingkan total PDRB Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010 peranan komponen ini hanya sebesar 0,44 persen, tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 0,45 persen, sejak tahun 2013 mencapai di atas 0,5 persen, kemudian pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,53 persen.

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Fungsi pemerintah dalam perekonomian modern secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, fungsi distribusi dimaksudkan pemerintah mengusahakan distribusi dan pemerataan bagi

kelangsungan ekonomi masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi pemerintah mempunyai peran mengusahakan stabilisasi dalam perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta *(private)* sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

TABEL 8.Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Badung, 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi Pemerinta	h						
a. ADHB (Miliar Rp)	1.793,06	2.115,13	2.456,84	2.806,67	2.698,62	2.956,43	3.003,77
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.793,06	1.927,96	2.062,37	2.202,76	1.994,11	2.049,10	2.018,26
Proporsi terhadap PDRB	8,60	9,00	9,03	8,83	7,24	7,14	6,51
Konsumsi Pemerintah per-	kapita (Rib	ou Rp)					
a. ADHB	3.279,79	3.770,95	4.272,76	4.765,14	4.477,56	4.796,29	4.767,89
b. ADHK 2010	3.279,79	3.437,27	3.586,73	3.739,83	3.308,63	3.324,30	3.203,58
Pertumbuhan ⁸ (%)	00						
a. Total konsumsi Pemerintah		7,52	6,97	6,81	-9,47	2,76	-1,51
b. Konsumsi perkapita		4,80	4,35	4,27	-11,53	0,47	-3,63
Jumlah penduduk (000 org)	546,70	560,90	575,0	589,0	602,7	616,4	630,0

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Total konsumsi pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu lima tahun terakhir terlihat mengalami fluktuasi, ditunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2016 konsumsi pemerintah mengalami penurunan.

Konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku berfluktuasi dalam periode 2010-2016. Konsumsi akhir pemerintah Badung tahun 2011 sebesar 2.115,13 miliar, naik dari tahun 2010 yang sebesar 1.793,06 miliar. Pada tahun 2012, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.456,84 miliar, mengalami peningkatan tahun 2013 mencapai Rp. 2.806,67 miliar, namun mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp. 2.698,62 miliar dan meningkat menjadi Rp. 2.956,43 miliar pada tahun 2015, dan sebesar 3.003,77 miliar pada tahun 2016. Sementara itu, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga dalam periode 2010-2016 juga mengalami fluktuasi, tahun 2010-2013 terlihat meningkat, pada tahun 2014 menurun dan tahun 2015 mengalami peningkatan, kemudian kembali turun pada tahun 2016. Pada setiap peningkatan komsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan mengindikasikan riil kenaikan bahwa secara telah terjadi

pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas, sebaliknya penurunan konsumsi yang telah terjadi pada tahun 2014 dan 2016 mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Peranan komponen pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB iuga mengalami tren yang berfluktuasi. Komponen pengeluaran pemerintah selama periode 2010-2016 tidak lebih dari 10 persen. Pada tahun 2010, 2011 proporsi pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB Kabupaten Badung sebesar 8,60 persen dan persen meningkat mencapai 9,03 persen tahun 2012, 9.00 kemudian turun menjadi 8,33 persen pada tahun 2013. Sementara itu, tahun berikutnya peranan pengeluaran terus menurun, yaitu mencapai 7,24 persen pada tahun 2014 dan 7,14 persen pada tahun 2015 bahkan pada tahun 2016 mencapai 6,51 persen.

Pemerintah yang salah satu fungsinya adalah melakukan pembangunan, memiliki keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana bagi masyarakat. Pengeluaran yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran yang bersifat investasi yang berupa prasarana dasar dan sarana fisik, serta pengeluaran rutin yang diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi belanja pegawai, barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, belanja rutin dan lain-lain.

Perkembangan komponen pengeluaran pemerintah rata-rata perkapita sejalan dengan perkembangan komponen pengeluaran total pemerintah. Konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 3.279,79 ribu, dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 4.796,29 ribu, kemudian berkurang menjadi sebesar 4.767,89 ribu tahun 2016. Sejalan dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan nampak terjadi hal yang sejalan.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan secara rata-rata mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 komponen pengeluaran pemerintah mampu tumbuh sebesar 6,97 persen, melambat dari tahun 2011 yang sebesar 7,52 persen, kemudian mengalami perlambatan kembali pada tahun 2013 sebesar 6,81 persen. Selanjutnya, pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,47 persen, pada tahun 2015 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,76 persen, dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016 sebesar 1,51 persen. Terjadinya penurunan konsumsi akhir Pemerintah di Kabupaten Badung, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah adanya penghematan oleh pemerintah melalui Inpres No. 8/2016, yang di dalamnya termasuk perwakilan

kementrian dan lembaga yang ada di Kabupaten Badung. Demikian juga halnya kemungkinan terjadinya penurunan konsumsi akhir pemerintah tahun 2014, kemungkinan terkait dengan adanya penghematan yaitu adanya Inpres No. 4/2014.

3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang lebih dikenal dengan merupakan komponen pengeluaran investasi PDRB berhubungan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi (output) di masa yang akan datang. Kegiatan masvarakat terus-menerus investasi memungkinkan suatu ekonomi dan kesempatan meningkatkan kegiatan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Peranan ini bersumber dari beberapa fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan kesempatan keria. Pertambahan modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.

Investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih baik, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Namun dalam perkembangannya diharapkan investasi yang dilakukan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan

lingkungan. Bagaimanapun, investasi yang disertai dengan perusakan lingkungan hanya akan menimbulkan masalah baru, bahkan mengurangi kesejahteraan penduduk yang bernaung di dalamnya.

Dampak pengganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara dalam kegiatan produksi, berkembangnya optimal perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih Investasi juga mendorong percepatan perkembangan besar. teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Investasi dapat menjadi pendorong roda. perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Pengeluaran PMTB Kabupaten Badung mengalami tren meningkat dalam periode 2010-2016. PMTB Kabupaten Badung pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku yaitu senilai Rp. 8.232,32 miliar dan senilai Rp. 10.051,86 miliar tahun 2011, mencapai Rp. 12.274,65 miliar tahun 2012, lalu meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 12.999,41 miliar. Selanjutnya meningkat secara terus menerus hingga menjadi Rp. 18.484,48 miliar pada tahun 2016.

Begitupula halnya yang terjadi pada pengeluaran PMTB atas dasar harga konstan, dimana terjadi peningkatan sebesar 57,31 persen selama periode 2010-2016.

TABEL 9.Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Badung, 2010-2016

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
To	tal PMTB							
a.	ADHB (Miliar Rp)	8.232,32	10.051,86	12.274,65	12.999,41	13.890,43	15.939,70	18.484,48
b.	ADHK 2010 (Miliar Rp)	8.232,32	9.539,52	10.565,50	11.073,70	11.120,65	11.892,74	12.950,37
	oporsi terhadap RB (% - ADHB)	39,49	42,76	45,13	40,89	37,27	38,52	40,05
	rtumbuhan ⁹ (%)		15.88	10,76	4,81	0,42	6,94	8,89

Keterangan:

Besaran komponen PMTB Kabupaten Badung sebagian besar didukung oleh adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kontribusi komponen PMTB memegang peranan yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Pengeluaran Kabupaten Badung. Hal ini cukup berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2012, peranan komponen PMTB di Kabupaten Badung sebesar 45,13 persen, yang sebelumnya yaitu tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 39,49 persen dan 42,76 persen. Pada tahun 2012 merupakan

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

periode puncak kontribusi komponen PMTB terhadap total PDRB Kabupaten Badung. Salah satu pendukung komponen PMTB adalah banyaknya kegiatan konstruksi atau bangunan. Pada tahun 2012, di Kabupaten Badung terdapat pembangunan infrastruktur yang cukup besar. Proyek besar tersebut adalah pembangunan Jalan Tol di Atas Perairan, perluasan Bandara Ngurah Rai dan pembangunan simpang Dewa Ruci. Hal ini bisa jadi cukup menentukan besaran PMTB Badung yang menambah investasi dalam bentuk infrastruktur. Pembangunan ini dilakukan "multi years", dan berakhir tahun 2013. Sehingga tak mengherankan proporsi komponen PMTB meningkat pada tahun 2012 dan tahun 2013. Peranan komponen PMTB pada tahun 2013 sebesar 40,89 persen, sedikit lebih rendah dari kondisi 2012. Kemudian pada tahun 2014 menjadi sebesar 37,27 persen dan sebesar 38,52 persen pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar 40,05 persen.

Investasi dalam pembangunan Jalan Tol di Atas Perairan tersebut menelan biaya sekitar 2,49 triliyun rupiah yang berasal dari konsorsium BUMN. Jalan Tol ini menghubungkan Benoa, Bandara Ngurah Rai dan kawasan selatan Bali yaitu Nusa Dua, dan memiliki panjang sekitar 11 km. Proyek ini dilakukan oleh konsorsium perusahaan konstruksi BUMN dengan lainnya yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Pelindo III, PT Angkasa Pura I dan Bali Tourism Development. Jalan tol ini

resmi didirikan mulai tanggal 21 Desember 2011 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2013.

Perluasan Bandara Ngurah Rai juga mendukung adanya besaran PMTB Kabupaten Badung yang lebih tinggi pada tahun 2012 dan 2013, selain Jalan Tol di Atas Perairan. Pembangunan perluasan Bandara Ngurah Rai dimaksudkan agar dapat menampung 25 juta penumpang hingga tahun 2025, dimana saat ini Bandara Ngurah Rai hanya mampu menampung sebanyak 13,5 juta penumpang. Proyek ini menelan investasi sekitar 2,8 triliyun rupiah. Begitupula halnya dengan pembangunan Simpang Dewa Ruci yang telah dilakukan mulai November 2011 sampai Mei 2013. Proyek ini menelan investasi sebesar 148 miliar rupiah.

Perkembangan komponen **PMTB** Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2010-2016. terutama pada tahun 2011 dan 2012 yang tumbuh masing-masing sebesar 15,88 persen dan 10,76 persen. Kemudian melambat kembali pada tahun-tahun setelahnya yaitu menjadi sebesar 4,81 persen pada tahun 2013 dan hanya 0,42 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan komponen **PMTB** Badung pada tahun 2015 mengalami percepatan kembali yaitu mencapai 6,94 persen, dan sebesar 8,89 persen pada tahun 2016.

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan **PDRR** komponen Pengeluaran Kabupaten Badung dengan proporsi terendah kedua komponen konsumsi LNPRT. Komponen hanva berkontribusi sekitar 2 persen ke bawah selama periode 2010-2016. Inventori merupakan persediaan barang (baik barang jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

TABEL 10.Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Badung, 2010-2016

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tot	al Nilai Inventori							
a.	ADHB (Miliar Rp)	263,71	386,93	548,69	516,79	415,87	108,66	135,29
b.	ADHK 2010 (Miliar Rp)	263,71	260,58	378,31	233,76	205,07	51,07	62,37
	porsi terhadap RB (% - ADHB)	1,26	1,65	2,02	1,63	1,12	0,26	0,29

Keterangan:

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Perkembangan perubahan inventori selama lima tahun periode 2010-2016 mengalami fluktuasi, dengan kontribusi yang cenderung menurun. Pada tahun 2010 perubahan inventori atas dasar harga berlaku Kabupaten Badung sebesar Rp. 263,71 miliar, menjadi sebesar Rp. 386,93 miliar tahun 2011, kemudian meningkat cukup drastis menjadi Rp. 548,69 miliar tahun 2012, selanjutnya menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 516,79 miliar. Penurunan perubahan inventori pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 415,87 miliar, dan tahun 2015 mengalami penurunan perubahan inventori kembali yaitu menjadi Rp. 108,66 miliar. Sementara tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp. 135,29 miliar.

Perubahan inventori Kabupaten Badung atas dasar harga konstan memiliki pola yang sama dengan perubahan inventori atas dasar harga berlakunya. Pada tahun 2010 komponen ini sebesar Rp. 263,71 miliar dan sebesar Rp. 260,58 miliar tahun 2011, meningkat drastis menjadi Rp. 378,31 miliar tahun 2012, dan pada tahun 2013 menurun menjadi Rp. 233,76 miliar, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing menjadi

sebesar Rp. 205,07 miliar dan Rp. 51,07 miliar. Sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi senilai Rp. 62,37 miliar.

3.7. Perkembangan Ekspor Barang Dan Jasa Luar Negeri

Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbedabeda satu sama lain. Suatu wilayah akan membutuhkan komoditi yang tidak tersedia di wilayahnya tetapi tersedia di wilayah lain, maka daerah tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran komoditi dengan wilayah lainnya. Wilayah tersebut memberlakukan sistem perekonomian terbuka dimana antar wilayah melakukan kegiatan pertukaran baik barang maupun jasa. Demikian pula halnya dengan yang dilakukan di Kabupaten Badung, dimana Kabupaten Badung melakukan perdagangan baik ekspor ke luar wilayah Badung, dan juga mendatangkan barang dan jasa dari luar wilayah Badung (impor).

Idealnya ekspor yang dilakukan adalah merupakan barang jadi sehingga nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Badung bisa menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan mengekspor barang mentah atau setengah jadi. Sementara itu, idealnya impor yang dilakukan sebaiknya adalah barang modal, mesin-mesin dan lain sebagainya yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan produksi yang ada di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan wilayah lain di Bali. Badung sebagai pusat destinasi para wisatawan mancanegara mempunyai kelebihan, dimana Kabupaten Badung melakukan ekspor terutama ekspor jasa kepada wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik luar Kabupaten Badung. Banyaknya Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Badung membuka peluang yang sangat besar untuk itu.

TABEL 11.
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Badung, 2010-2016

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
То	tal Nilai Ekspo	r						
a.	ADHB (Miliar Rp)	14.721,11	17.023,57	21.535,02	25.558,78	30.885,87	31.499,93	35.829,23
b.	ADHK 2000 (Miliar Rp)	14.721,11	15.331,97	19.848,59	23.591,06	26.748,14	27.167,34	28.369,64
tei	oporsi hadap PDRB - <i>ADHB)</i>	70,61	72,41	79,17	80,40	82,86	76,12	77,64
Pe	rtumbuhan ¹⁰		4.15	29,46	18,86	13,38	1,57	4,43

Keterangan:

Nilai ekspor Badung selama lima tahun terakhir, mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010, nilai ekspor atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 14.721,11 miliar, meningkat tahun 2011 sebesar Rp. 17.023,57 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp. 21.535,02 miliar, kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 25.558,78 miliar pada tahun 2013. Memasuki tahun 2014 nilai ekspor mengalami peningkatan lagi hingga mencapai Rp. 30.885,87 miliar, dan telah mencapai Rp. 31.499,93 miliar pada tahun 2015.

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Kinerja ekspor Kabupaten Badung pada tahun 2016 sebesar Rp. 35.829,23 miliar, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Nilai ekspor atas dasar harga konstan 2010 sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu mengalami tren peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Nilai ekspor "riil" pada masing-masing tahun adalah sebesar Rp. 14.721,11 miliar (2010); Rp. 15.331,97 miliar (2011); Rp. 19.848,59 miliar (2012); Rp. 23.591,06 miliar (2013); Rp. 26.748,14 miliar (2014); dan Rp. 27.167,34 miliar (2015); serta senilai 28.369,64 miliar pada tahun 2016.

Kecenderungan nominal ekspor memperlihatkan adanya peningkatan, namun secara proporsi mengalami fluktuasi. Mulai tahun 2010-2014 kinerja ekspor secara proporsi mengalami peningkatan, sedangkan setahun kemudian (2015) mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya (2016). Proporsi ekspor pada tahun 2010 sebesar 70,61 persen menjadi sebesar 82,86 persen pada tahun 2014, sebesar 76,12 persen pada tahun 2015 dan pada akhir periode pada tahun 2016 mencapai sebesar 77,64 persen.

Pertumbuhan ekspor Kabupaten Badung dalam periode 2010-2016 mengalami pertumbuhan positif, walaupun dari sisi besaran pertumbuhan terjadi fluktuasi. Keadaan ini terlihat pada pertumbuhan ekspor pada tahun 2012 sebesar 29,46 persen,

mengalami percepatan cukup drastis dari tahun 2011 yang sebesar 4,15 persen, kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2013 yang sebesar 18,86 persen. Pada tahun 2014 kinerka ekspor Kabupaten Badung kembali melambat kembali, dengan pertumbuhan pada tahun ini sebesar 13,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan ekspor mengalami perlambatan yang cukup tajam yaitu hanya mencapai sebesar 1,57 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan sehingga pertumbuhan ekspor Kabupaten Badung pada tahun ini mencapai 4,43 persen.

3.8. Perkembangan Impor Barang Dan Jasa Luar Negeri

Sistem ekonomi terbuka yang dikembangkan dalam wilayah perekonomian, maka Kabupaten Badung tidak bisa terlepas dari adanya produk dari luar wilayah Badung. Produk dari luar wilayah Badung tersebut tersebar di berbagai aktivitas pengeluaran, baik itu konsumsi rumah tangga, LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB termasuk inventori serta pengeluaran atas ekspor. Sehingga dengan demikian, pada penghitungan PDRB pengeluaran, besaran impor tersebut menjadi pengurang. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Badung. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha. Impor yang dimaksud dapat berupa barang maupun jasa. Semakin besar impor suatu wilayah maka semakin besar ketergantungan wilayah itu terhadap wilayah

luar. Nilai impor Kabupaten Badung selama rentang waktu 2012-2016 mengalami kecenderungan yang sama dengan yang terjadi pada nilai ekspor.

TABEL 12.Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Nilai Impor							
a. ADHB (Miliar Rp)	14.316,94	17.577,56	22.364,24	23.843,10	26.009,27	26.618,02	30.648,51
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	14.316,94	15.640,74	20.368,99	23.241,78	25.067,14	25.346,99	26.604,01
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	68,67	74,77	82,22	75,00	69,78	64,32	66,41
Pertumbuhan ¹¹		9,25	30,23	14,10	7,85	1,12	4,96

Keterangan:

Nilai impor Kabupaten Badung selama periode 2010-2016 tersebut secara nominal terus mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku, nilai impor pada tahun 2010 dan tahun 2011 masingmasing sebesar Rp. 14.316,94 miliar dan Rp. 17.577,56 miliar, selanjutnya tahun 2012 sebesar Rp. 22.364,24 miliar, mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 23.843,10 miliar. Selanjutnya pada tahun 2014 nilai impor mencapai Rp. 26.009,27 miliar dan meningkat lagi pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing menjadi Rp. 26.618,02 miliar dan Rp. 30.648,51

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

miliar. Hal sejalan juga terjadi pada nilai impor atas dasar harga konstan.

Proporsi total impor terhadap total PDRB pengeluaran, ratarata sebesar 71,60 persen setiap tahun selama periode 2010-2016. Dalam penghitungan ini, nilai PDRB pengeluaran masih memiliki diskrepansi dengan PDRB Lapangan Usaha yang masih dimasukkan dalam komponen impor, karena keterbatasan data mengenai impor. Sementara itu, dari sisi pertumbuhannya, komponen impor mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2010-2016. Pertumbuhan impor pada tahun 2012 yang mencapai 30,23 persen, mengalami percepatan dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,25 persen, selanjutnya terjadi penurunan yaitu sebesar 14,10 persen (2013), 7,85 persen (2014), 1,12 persen (2015), dan meningkat menjadi sebesar 4,96 persen pada tahun 2016.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BADUNG MENURUT PENGELUARAN







Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Bersumber dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB perkapita Kabupaten Badung dalam periode 2010-2016, terlihat mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan nilai nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Seperti yang dikemukakan pada Bab sebelumnya, hal ini sejalan dengan adanya pertambahan penduduk di Kabupaten Badung. Besaran PDRB perkapita atas dasar harga

berlaku Kabupaten Badung pada tahun 2010 sebesar Rp. 38,14 juta dan sebesar Rp. 41,91 juta pada tahun 2011. Pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 47,31 juta, dan kemudian meningkat dalam waktu empat tahun menjadi Rp. 73,25 juta tahun 2016. Sementara itu, berdasarkan atas harga konstan 2010, PDRB perkapita Kabupaten Badung meningkat dari Rp. 38,14 juta (2010) menjadi Rp. 49,46 juta (2016).

TABEL 13.Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Badung, 2010-2016

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	lai PDRB Iiliar Rp)							
-	ADHB	20.848,56	23.508,47	27.200,75	31.790,03	37.273,28	41.384,28	46.147,88
-	ADHK 2010	20.848,56	22.322,70	24.027,65	25.666,53	27.458,06	29.180,48	31.160,58
	RB perkapita ibu Rp)							
-	ADHB	38.135,29	41.912,05	47.305,65	53.972,89	61.843,84	67.138,68	73.250,61
-	ADHK 2010	38.135,29	39.798,00	41.787,22	43.576,45	45.558,42	47.340,17	49.461,25
PD	rtumbuhan PRB perkapita PHK 2010 (%)	1/18	4,36	5,00	4,28	4,55	3,91	4,48
	mlah penduduk 00 org)	546,70	560,90	575,0	589,0	602,7	616,4	630,0
Pe	rtumbuhan (%)		2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2

Keterangan:

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Badung juga mendukung kondisi perekonomian Badung. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan migran yang disebabkan karena Kabupaten Badung dianggap sebagai daerah

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

yang memiliki peluang tersedianya lapangan pekerjaan yang luas. Sebagai daerah destinasi pariwisata tentunya Kabupaten Badung membuka peluang kerja yang sangat besar dan menjadi incaran bagi pencari kerja baik penduduk Badung sendiri maupun penduduk luar Kabupaten Badung. Kumpulan penduduk ini melakukan aktivitas ekonomi sehingga menambah nilai tambah ekonomi di setiap lapangan usaha yang ada. Selain menambah nilai tambah dari tiap lapangan usaha, penduduk ini juga melakukan kegiatan konsumsi yang tercermin pada PDRB pengeluaran.

Pertumbuhan PDRB perkapita dalam periode 2011-2016 mengalami sedikit fluktuasi, namun selalu positif. Pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 5 persen, mengalami percepatan dari tahun 2011 yang tumbuh sebesar 4,36 persen, selanjutnya tahun 2013 mencapai 4,28 persen, dan mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 4,55 persen dan kembali melambat tahun 2015 menjadi 3,91 persen, pada akhirnya tahun 2016 mengalami menjadi sebesar 4,48 percepatan persen. Sementara itu. pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Badung hanya berada di atas dua persen. Ini mengindikasikan bahwa perekonomian penduduk Kabupaten Badung tidak saja meningkatkan kuantitasnya dalam melakukan pengeluaran tetapi pula meningkat dari sisi kualitasnya. Hal ini sebagai indikasi awal yang dapat ditunjukkan, karena sesungguhnya PDRB merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan baik oleh residen maupun non residen Kabupaten Badung tetapi kegiatan ekonominya tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Badung.

4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Perbandingan ini merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar produk yang dikonsumsi rumah tangga iika dibandingkan dengan produk yang diekspor ke luar wilayah Kabupaten Badung. Sedikit berbeda dengan kabupatenkabupaten yang ada di Bali, Kabupaten Badung mengekspor produk yang dihasilkannya lebih besar jika dibandingkan dengan produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Badung. Ini terlihat dari besarnya perbandingan konsumsi rumah tangga dengan ekspor di Kabupaten Badung yang besarannya berada di bawah satu. Pada tahun 2010 perbandingannya adalah sebesar 0,68, yang artinya konsumsi rumah tangga lebih kecil sebesar 0,68 kali dibandingkan yang diekspor atau ekpor lebih besar 1,5 kali lipat jika dibandingkan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Badung, kondisi tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 1,5 kali dan 1,7 kali lipat ekspor lebih besar dibandingkan dengan konsumsi akhir rumah tangga. Begitupula selanjutnya yang terjadi pada tahun 2013-2016, nilai ekspor lebih besar 1,9 kali pada tahun 2013, 2,0 kali dan 1,8 kali pada tahun 2014 dan 2015, dan sebesar 1.9 kali lebih besar pada tahun 2016.

TABEL 14.Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah
Tangga terhadap Ekspor Kabupaten Badung, 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	10.063,38	11.403,67	12.628,17	13.582,46	15.197,89	17.274,59	19.099,34
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	14.721,11	17.023,57	21.535,02	25.558,78	30.885,87	31.499,93	35.829,23
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,68	0,67	0,59	0,53	0,49	0,55	0,53

Keterangan:

Fenomena bahwa besaran ekspor jauh lebih besar dari pada nilai konsumsi rumah tangga mengundang banyak pertanyaan, misalnya: Mengapa bisa terjadi hal yang demikian?; Apakah produk yang dihasilkan Kabupaten Badung sangat berlebihan sehingga bisa diekspor jauh melebihi yang digunakan oleh masyarakat Badung sendiri?. Jika kita melihat dari sisi barang, Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang mengimpor barang yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Hal ini terlihat dari besaran nilai impor yang juga tinggi di Kabupaten Badung. Sementara itu perlu dipahami bahwa komoditas ekspor atau pun impor Badung berbeda dengan komoditas yang menjadi konsumsi akhir rumah tangga.

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Nilai ekspor Kabupaten Badung yang tinggi disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan pengekspor jasa terbesar di Provinsi Bali. Ekspor jasa ini dapat berupa pelayanan jasa terhadap para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berasal dari luar Kabupaten Badung. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tahun 2014, 2015 dan 2016 secara berturut-turut sebesar 3.8 juta, 4.0 juta dan 4.93 juta wisatawan. sehingga Badung sebagai destinasi utama di Bali menyumbang ekspor jasa tertinggi. Banyaknya hotel dan restoran di Badung merupakan salah satu penyumbang pengekspor jasa. Selain itu, dibeli barang-barang yang langsung oleh para wisatawan mancanegara juga merupakan barang ekspor, sehingga tidak mengherankan jika nilai ekspor Kabupaten Badung cukup tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.

4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap besarnya PMTB, memperlihatkan besarnya perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan besarnya investasi yang ada di Kabupaten Badung. Secara makro ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan baik jika penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, hal ini disebabkan karena dengan investasi maka akan menciptakan multiflier efek bagi ekonomi wilayah tersebut.

Perkembangan perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

TABEL 15.

Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB

Kabupaten Badung, 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	10.063,38	11.403,67	12.628,17	13.582,46	15.197,89	17.274,59	19.099,34
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	8.232,32	10.051,86	12.274,65	12.999,41	13.890,43	15.939,70	18.484,48
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,22	1,13	1,03	1,04	1,09	1,08	1,03

Keterangan:

Rasio nilai konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB, dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun selama periode 2010-2016. Hal ini terlihat dari rasio antara keduanya sekitar di atas angka 1. Kondisi ini mengandung arti bahwa pengeluaran makro konsumsi akhir rumah tangga selalu lebih besar dari pada pembentukan investasi di Kabupaten Badung.

4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Pengertian konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun rumah tangga dan kedua institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

TABEL 16.

Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Badung, 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Akhir (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>							
a. Rumah tangga	10.063,38	11.403,67	12.628,17	13.582,46	15.197,89	17.274,59	19.099,34
b. LNPRT	91,92	104,87	121,62	169,04	193,86	223,00	244,28
c. Pemerintah	1.793,06	2.115,13	2.456,84	2.806,67	2.698,62	2.956,43	3.003,77
Jumlah	11.948,37	13.623,67	5.206,63	16.558,16	18.090,38	20.454,02	22.347,39
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	20.848,56	23.508,47	27.200,75	31.790,03	37.273,28	41.384,28	46.147,88
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB (%)	57,31	57,95	55,91	52,09	48,53	49,42	48,43

Keterangan:

Barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Badung sekitar sebagiannya digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Hal ini terlihat dari proporsi permintaan akhir yang yang berada pada kisaran 48,43-57,95 persen selama periode 2010-

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

2016. Perkembangan dalam periode 2010-2016, proporsi konsumsi akhir cenderung mengalami penurunan, sempat mencapai 49,42 persen pada tahun 2015, lalu mengalami penurunan hingga mencapai 48,43 persen pada tahun 2016. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan, dengan kata lain laju peningkatan PDRB secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

4.5. Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Penambahan investasi atau disebut juga sebagai PMTB, dalam perekonomian makro secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai ekspor. Investasi yang terjadi di wilayah domestik Kabupaten Badung tentunya dapat meningkatkan kinerja ekspor. Misalnya saja penambahan investasi berupa barang modal di pertanian akan meningkatkan produksi pertanian itu sendiri sehingga selain akan dikonsumsi oleh penghuni domestik wilayah Badung, juga akan diperdagangkan ke luar wilayah Badung (mengekspor). Begitupula halnya jika terjadi pada lapangan usaha industri, dimana penambahan investasi di pabrik-pabrik dan wilayah industri lainnya tentunya akan meningkatkan produksi dari industri pengolahan, bisa berupa modal ataupun berupa penambahan mesin-mesin baru.

TABEL 17.
Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB)
Kabupaten Badung 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	14.721,11	17.023,57	21.535,02	25.558,78	30.885,87	31.499,93	35.829,23
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	8.232,32	10.051,86	12.274,65	12.999,41	13.890,43	15.939,70	18.484,48
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,79	1,69	1,75	1,97	2,22	1,98	1,94

Keterangan:

Tabel 17, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin besar PMTB (investasi) yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung, maka semakin besar pula ekspor yang terjadi. Investasi di bidang pariwisata tentunya membawa dampak besar terhadap perkembangan ekspor khususnya ekspor jasa di Kabupaten Badung. Walaupun demikian, fenomena yang terjadi di Badung adalah bahwa terdapat kemungkinan sebagian besar para investor di bidang pariwisata ini bukanlah penduduk Kabupaten Badung, melainkan penduduk wilayah luar Badung, sehingga bila hal tersebut banyak terjadi maka keuntungan yang didapat sebagian mengalir ke luar wilayah Kabupaten Badung.

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

4.6. Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Masyarakat Ekonomi Asean/MEA atau dikenal dengan Asean Free Trade Area/AFTA merupakan area perdagangan bebas antar wilayah yang berlaku pada tahun 2015, maka akan menimbulkan keadaan yang semakin kompleks. Sebelum diberlakukannya MEA pun, nilai impor Kabupaten Badung sudah termasuk tinggi. Pada tahun 2015 saat MEA mulai diberlakukan, barang-barang impor semakin leluasa untuk beredar di dalam negeri begitupula yang terjadi di Kabupaten Badung jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan persoalan perekonomian baru.

TABEL 18.Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Badung 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	20.848,56	23.508,47	27.200,75	31.790,03	37.273,28	41.384,28	46.147,88
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	14.316,94	17.577,56	22.364,24	23.843,10	26.009,27	26.618,02	30.648,51
Rasio PDRB terhadap Impor	1,46	1,34	1,22	1,33	1,43	1,55	1,51

Keterangan:

Data PDRB menurut penggunaan memperlihatkan rasio yang cukup rendah terhadap nilai impornya, yang mengandung arti bahwa proporsi impor Kabupaten Badung yang masih cukup tinggi

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

iika dibandingkan dengan total PDRB pengeluaran, Rasio PDRB terhadap impor pada tahun 2010 mencapai 1,46 dan mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2015 mencapai 1,55, namun menurun menjadi 1,51 pada tahun 2016. Angka rasio PDRB terhadap impor ini terlihat masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, yang berarti bahwa proporsi impor dari PDRB Badung yang cukup tinggi. Sementara itu, diketahui pula bahwa dalam penghitungan **PDRB** ini masih mengandung diskrepansi antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran yang dimasukkan ke dalam nilai impor dikarenakan ketersediaan data yang masih minim dalam penghitungan impor.

4.7. Neraca Perdagangan (Trade Balance)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar Kabupaten Badung (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

TABEL 19.

Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kabupaten Badung 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	14.721,11	17.023,57	21.535,02	25.558,78	30.885,87	31.499,93	35.829,23
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	14.316,94	17.577,56	22.364,24	23.843,10	26.009,27	26.618,02	30.648,51
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	404,16	-553,99	-829,22	1.715,67	4.876,60	4.881,91	5.180,72
Rasio ekspor thdp Impor	1,03	0,97	0,96	1,07	1,19	1,18	1,17

Keterangan:

Net ekspor Kabupaten Badung mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun 2011 dan 2012, karena nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor, sehingga terjadi aliran dana devisa Kabupaten Badung yang mengalir dari dalam wilayah Badung

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

menuju ke luar wilayah Badung. Namun berbeda halnya yang terjadi pada tahun 2013 dimana besarnya nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor sehingga terjadi hal yang sebaliknya yaitu aliran dana devisa masuk dari luar wilayah Badung menuju dalam wilayah Badung. Keadaan ini terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Besaran net ekspor Kabupaten Badung pada periode 2010-2016 berturut-turut adalah Rp. 404,16 miliar, Rp. -553,99, Rp. -829.22 miliar, Rp. 1,715.67 miliar, Rp. 4,876.60 miliar, Rp. 4,881.91 miliar, dan Rp. 5,180.72 miliar.

Rasio perbandingan antara ekspor dan impor di Kabupaten Badung sedikit fluktuatif. Angka rasio di bawah satu terjadi pada tahun 2011 dan 2012 dan di atas satu terjadi pada periode 2013-2016. Rasio Ekspor terhadap Impor Badung sedikit menunjukkan penurunan mulai tahun 2015 sebesar 1,18 dan tahun 2016 sebesar 1,17.

4.8. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Indikator yang dapat diturunkan dari penghitungan PDRB pengeluaran salah satunya adalah besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Besaran ini dapat menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Dengan kata lain dapat diartikan secara lebih sederhana yaitu suatu besaran yang menggambarkan

seberapa besar investasi yang diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

TABEL 20.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kabupaten Badung, 2012-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	20.848,56	22.322,70	24.027,65	25.666,53	27.458,06	29.180,48	31.160,58
Perubahan (miliar rupiah)		1.474,14	1.704,95	1.638,88	1.791,53	1.722,42	1.980,11
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	8.232,32	9.539,52	10.565,50	11.073,70	11.120,65	11.892,74	12.950,37
ICOR	7	6,47	6,20	6,76	6,21	6,90	6,54

Keterangan:

Nilai ICOR di Kabupaten Badung berada pada kisaran angka di atas 6 selama periode tahun 2011-2016, masing-masing sebesar 6,47, 6,20, 6,76, 6,21, 6,90, dan sebesar 6,54 pada tahun 2016. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pertambahan satu miliar nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 6,54 miliar pada tahun 2016.

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Hite: Ilload unokalo ido ido

BAB V PENUTUP



Hite: III adungkab ing salah period

5.1 Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dapat dikatakan sangat baik karena menempati posisi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 di antara kabupaten/kota lainnya di Bali. Bahkan ekonomi Badung yang tumbuh sebesar 6,79 persen tahun 2016 berada diatas laju perekonomian Provinsi Bali dan juga nasional. Pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dari kondisi tahun 2015 yang sebesar 6,27 persen.

Kontribusi dominan atas besaran PDRB pengeluaran Badung adalah dari komponen konsumsi akhir rumah tangga dan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB). Masing-masing komponen menyumbang sebesar 41,39 persen dan 40,05 persen terhadap pembentukan total PDRB pengeluaran Badung pada tahun 2016. Aktivitas pembangunan fisik yang terjadi di wilayah Badung menyebabkan proporsi investasi dapat mengimbangi konsumsi rumah tangga. Dilihat dari sisi perdagangan luar wilayah, ekspor dan impor juga menyumbang proporsi yang tinggi di Badung. Sementara itu, secara netto kinerja ekspor-impor di Kabupaten Badung telah mengalami perkembangan cukup baik, bernilai positif sejak tahun 2013-2016 atau mengalami surplus.

Kabupaten Badung tidak saja mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, pada sisi lain jika dilihat dari besaran nominal PDRB atas dasar harga berlaku juga menduduki peringkat

pertama jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Badung pada Tahun 2016 mencapai Rp. 46,15 triliyun, dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 31,16 triliyun. Begitupula halnya dengan PDRB perkapita Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama se-Bali. Walaupun demikian, angka kasar ini belum dapat sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Badung, akan tetapi angka PDRB perkapita hanya mampu menggambarkan kemakmuran wilayah Badung, dikarenakan PDRB didapat dengan menghitung aktivitas ekonomi yang ada di wilayah Badung tanpa melihat darimana asal input ekonomi yang terjadi, baik dari residen maupun nonresiden Badung.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR), menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR dapat diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Dengan kata lain dapat diartikan secara lebih sederhana yaitu suatu besaran yang menggambarkan seberapa besar investasi yang diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Badung mencatat nilai ICOR sebesar 6,54 tahun 2016, hal ini dapat diartikan bahwa setiap pertambahan satu miliar nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 6,54 miliar pada tahun 2016.

5.2 Saran

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah sepakat diberlakukan mulai tahun 2015, perlu adanya pembenahan secara terus menerus dalam perekonomian Kabupaten Badung. Dengan pemberlakuan MEA, tentunya barangbarang dan produk dari luar negeri akan secara mudah beredar, untuk itu diperlukan penguatan ekonomi domestik dengan mengajak seluruh kalangan untuk menggunakan produk sendiri dibandingkan produk luar.

Pola konsumtif masyarakat yang masih gandrung dengan produk luar daerah boleh jadi merupakan salah satu kendala, untuk itu segala upaya diperlukan dalam rangka perbaikan kualitas hasil indutri dalam negeri untuk mampu bersaing dalam kompetisi MEA. Dan yang terpenting adalah membudayakan masyarakat untuk berpola konsumsi akan produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah Badung sendiri menjadi perhatian bersama.

Hite: III adungkab ing salah period

LAM. LAMPIRAN

hii. Pilloadunokabibasi oo iid

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung 2010-2015 (Juta Rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	10.063.384,30	11.403.671,00	12.628.172,96	13.582.461,29	15.197.894,49	17.274.586,36	19.099.341,58
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	91.921,07	104.871,55	121.616,19	169.035,18	193.862,08	222.998,94	244.278,32
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.793.061,76	2.115.125,34	2.456.837,00	2.806.665,96	2.698.624,81	2.956.434,20	3.003.773,55
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8.232.322,30	10.051.862,07	12.274.653,62	12.999.406,72	13.890.429,33	15.939.696,24	18.484.484,83
5.	Perubahan Inventori	263.707,10	386.931,88	548.689,66	516.787,96	415.873,11	108.657,61	135.285,09
6.	Ekspor Barang dan Jasa	14.721.106,01	17.023.565,54	21.535.019,31	25.558.775,69	30.885.865,73	31.499.926,17	35.829.234,07
7.	Impor Barang dan Jasa	14.316.941,29	17.577.559,48	22.364.241,28	23.843.101,21	26.009.268,73	26.618.018,59	30.648.514,56
	PDRB adhb	20.848.561,24	23.508.467,91	27.200.747,47	31.790.031,60	37.273.280,81	41.384.280,92	46.147.882,89

^{*} Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung 2010-2016 (Juta Rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	10.063.384,30	10.803.832,98	11.433.422,05	11.669.447,49	12.317.655,76	13.220.872,27	14.207.917,49
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	91.921,07	99.566,95	108.455,43	137.580,58	139.571,09	146.349,36	156.031,97
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.793.061,76	1.927.964,09	2.062.369,27	2.202.757,54	1.994.108,46	2.049.100,97	2.018.257,64
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8.232.322,30	9.539.520,39	10.565.500,75	11.073.702,95	11.120.650,82	11.892.740,88	12.950.374,08
5.	Perubahan Inventori	263.707,10	260.583,19	378.311,09	233.756,75	205.074,03	51.065,82	62.371,99
6.	Ekspor Barang dan Jasa	14.721.106,01	15.331.970,02	19.848.586,24	23.591.063,09	26.748.139,55	27.167.339,26	28.369.640,26
7.	Impor Barang dan Jasa	14.316.941,29	15.640.738,50	20.368.993,68	23.241.776,78	25.067.139,63	25.346.989,16	26.604.008,84
	PDRB adhk 2010	20.848.561,24	22.322.699,12	24.027.651,15	25.666.531,63	27.458.060,08	29.180.479,41	31.160.584,59

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung 2010-2016 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	48,27	48,51	46,43	42,73	40,77	41,74	41,39
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,44	0,45	0,45	0,53	0,52	0,54	0,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,60	9,00	9,03	8,83	7,24	7,14	6,51
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	39,49	42,76	45,13	40,89	37,27	38,52	40,05
5. Perubahan Inventori	1,26	1,65	2,02	1,63	1,12	0,26	0,29
6. Ekspor Barang dan Jasa	70,61	72,41	79,17	80,40	82,86	76,12	77,64
7. Impor Barang dan Jasa	68,67	74,77	82,22	75,00	69,78	64,32	66,41
PDRB adhb	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung 2010-2016 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	7,36	5,83	2,06	5,55	7,33	7,47
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,32	8,93	26,85	1,45	4,86	6,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,52	6,97	6,81	-9,47	2,76	-1,51
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	15,88	10,76	4,81	0,42	6,94	8,89
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Ekspor Barang dan Jasa	4,15	29,46	18,86	13,38	1,57	4,43
7. Impor Barang dan Jasa	9,25	30,23	14,10	7,85	1,12	4,96
Laju PDRB adhk	7,07	7,64	6,82	6,98	6,27	6,79

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 5.

Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2011-2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	105,55	110,45	116,39	123,38	130,66	134,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105,33	112,13	122,86	138,90	152,37	156,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	109,71	119,13	127,42	135,33	144,28	148,83
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	105,37	116,18	117,39	124,91	134,03	142,73
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Ekspor Barang dan Jasa	111,03	108,50	108,34	115,47	115,95	126,29
7. Impor Barang dan Jasa	112,38	109,80	102,59	103,76	105,01	115,20
PDRB	105,31	113,21	123,86	135,75	141,82	148,10

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 6.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2011-2016 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5.55	4.64	5.38	6.01	5.90	2.88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.33	6.46	9.57	13.05	9.70	2.74
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.71	8.59	6.96	6.21	6.61	3.15
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.37	10.26	1.04	6.40	7.30	6.49
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Ekspor Barang dan Jasa	11.03	-2.28	-0.14	6.58	0.41	8.92
7. Impor Barang dan Jasa	12.38	-2.30	-6.57	1.14	1.21	9.70
PDRB	5.31	7.50	9.41	9.60	4.48	4.42

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

hiile: Illoadunokalo ida



MENCERDASKAN BANGSA



